



**STRATEGI INDONESIA DALAM KEPEMIMPINAN ASEAN 2011
(ANALISIS PERANAN INDONESIA SEBAGAI PENENGAH KONFLIK
THAILAND-KAMBOJA 2008-2011)**

**Triawan Putra¹, Drs.Tri Cahyo Utomo, MA², Dr.Reni Windiani, MS³
Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H.Soedarto, SH, Tembalang, Semarang**

Abstraksi :

Penelitian ini menjelaskan tentang peran Indonesia sebagai mediator konflik Thailand-Kamboja saat Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2011. Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja beberapa tahun yang lalu membuat ASEAN meminta kedua belah pihak agar cepat menyelesaikan konflik mereka, karena bisa mengganggu kerja sama antar negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, konflik ini harus diselesaikan agar tidak meluas. Adanya intervensi oleh ASEAN dan PBB, dikarenakan kegagalan kerja sama bilateral antara Thailand-Kamboja dalam rangka penyelesaian konflik tersebut. Sebuah keputusan yang dikeluarkan PBB melimpahkan kepada ASEAN untuk menyelesaikan konflik ini. Pemerintah Indonesia berperan sebagai mediator telah membantu keduanya melakukan pertemuan dan negosiasi di Indonesia. Indonesia telah menawarkan solusi, namun belum diimplementasikan karena masih menunggu persetujuan dari kabinet dan parlemen Thailand. Walaupun belum mencapai kesepakatan perdamaian, setelah di mediasi oleh Indonesia, hubungan antara Thailand-Kamboja yang sudah lebih baik dan kondisi batas yang kondusif.

Kata kunci : konflik, mediasi, peran

Abstract :

This research describes the role of Indonesia as mediator Thailand-Cambodia border conflict while Indonesia as ASEAN Chair 2011. Conflict between Thailand and Cambodia a few years ago made the other members of ASEAN advise both parties to resolve their conflict, because being bother cooperation among ASEAN countries. Therefore, in order not expand, this conflict should be resolve. A failure of bilateral cooperation in order to conflict resolution making interference by ASEAN and the UN. A decision had been delegated by United Nations to ASEAN to resolve this conflict. The Government of Indonesia as mediator had helped both meet and negotiate in Indonesia. Indonesia has offered a solution, but it has not been done because it is still awaiting approval from the cabinet and parliament Thailand. After mediation by Indonesia, relations between Thailand-Cambodia have already better, and also boundary conditions have been conducive. Although it has not achieve a peace agreement.

Keywords : conflict, mediation, role

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2009, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang. Email : triawan.putra@gmail.com

² Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

³ Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP

Pendahuluan

Negara yang berbatasan langsung antara daratan maupun lautan sangat rentan dengan konflik perbatasan. Kedaulatan yang masing-masing harus dijaga ini membuat berbagai negara mempertahankan mati-matian wilayah kedaulatan mereka. Penggunaan kekerasan adalah hal yang tidak asing dalam permasalahan Internasional dalam rangka mencapai kepentingan dan tujuan tiap negara. Thailand dan Kamboja tidak hanya memiliki kedekatan geografis tapi juga sejarah keduanya juga berhubungan erat. Thailand-Kamboja yang dahulu berbentuk kerajaan dan saling melakukan invansi terutama kerajaan *Siam* (Thailand) yang terkenal agresif kepada kerajaan lainnya seperti *Khmer* (Kamboja).

Konflik yang terjadi antara Thailand-Kamboja ini merupakan salah satu konflik yang menggunakan kekerasan fisik. Cara kekerasan saat ini sudah tidak lagi menjadi cara utama dalam penyelesaian berbagai permasalahan antar bangsa, karena isu-isu internasional yang semakin kompleks dan banyaknya aktor-aktor baru yang mempengaruhi kebijakan dan iklim politik internasional. Untuk itu cara-cara kekerasan atau yang berbentuk fisik ini dikesampingkan, dan mengutamakan cara-cara damai, tanpa kekerasan, diplomatis, dan saling menghormati satu sama lain.

Thailand dan Kamboja telah melakukan proses perundingan bilateral yang bersifat formal maupun informal untuk menyelesaikan pertentangan diantara mereka, tetapi proses bilateral ini tidak berhasil dalam menemukan solusi, maka pada akhirnya proses penyelesaian kasus ini meminta bantuan kepada pihak lain. Untuk itu ASEAN menjadi sorotan utama dalam proses penyelesaian konflik ini karena baik Thailand maupun Kamboja adalah negara anggota ASEAN. Melalui Indonesia sebagai ketua ASEAN pada saat itu ditunjuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Ini merupakan tantangan pertama yang dihadapi Indonesia dalam kepemimpinan di ASEAN tahun 2011. Salah satu prioritas kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2011 adalah untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Untuk itu yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apa saja yang menyebabkan konflik perbatasan Thailand-Kamboja ini dan bagaimana perkembangan serta upaya penyelesaiannya oleh kedua belah pihak, kemudian bagaimana mekanisme penyelesaian konflik di ASEAN, dan bagaimana peranan dan langkah-langkah Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 dalam menengahi konflik Thailand-Kamboja. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab konflik, perkembangannya, dan upaya yang telah dilakukan sebelumnya oleh kedua belah pihak, untuk mengetahui mekanisme penyelesaian konflik ASEAN, serta untuk mengetahui peranan dan langkah-langkah Indonesia sebagai ketua ASEAN 2011 dalam menengahi konflik Thailand-Kamboja tersebut.

Teori dan Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan teori konflik sebagai teori utama dalam membahas permasalahan secara umum. Yang dimuat dalam teori konflik ini yaitu mengenai proses konflik, manajemen konflik, dan resolusi konflik. Adapun teori lain yaitu teori kepemimpinan dan kepemimpinan dalam organisasi.

Desain penelitian menggunakan metode deskriptif-analisis. Deskriptif yang berarti pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat sehingga dapat membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan analitis adalah metode yang digunakan

untuk menghimpun semua data dan kenyataan yang didapat secara sistematis sehingga diharapkan dapat menginterpretasikan secara mendalam dan juga memperlihatkan hubungan-hubungan antar fakta yang ada. Jadi penelitian ini mendeskripsikan peranan Indonesia dalam menengahi konflik Thailand-Kamboja saat menjabat sebagai ketua ASEAN 2011, dengan cara menghimpun semua data tentang bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia betepatan dengan perannya sebagai Ketua ASEAN dalam menengahi konflik Thailand-Kamboja secara urut dan sistematis.

Jenis data hasil penelitian ini adalah teks atau kata-kata tertulis yang akan mendeskripsikan atau mempresentasikan tindakan-tindakan dan fenomena yang terjadi. Data penelitian didapat melalui dua cara yaitu (1) data primer yang didapat langsung dari sumber atau pihak yang terlibat, ini dilakukan dengan cara Interview kepada pihak Kementerian Luar Negeri RI, (2) data sekunder yang didapat secara tidak langsung dari sumbernya seperti melalui melalui pengamatan dan mendengar informasi dengan baik dari surat kabar, majalah, dokumen, berita, dan lain sebagainya yang bersifat literatur dan dokumenter.

Pembahasan

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja merupakan sebuah peristiwa sejarah yang sudah lama terjadi, akar permasalahan yang utama yaitu (1) pertama, saat keputusan ICJ menetapkan kepemilikan Candi Preah Vihear atas nama Kamboja didasarkan “Annex I Map” yang dibentuk Perancis dan Siam pada tahun 1907. Secara *de facto* dan *de jure*, kepemilikan Candi Preah Vihear dan wilayah sekitarnya telah sah atas nama Kamboja. Tidak ada hak Thailand untuk menggugat keputusan ICJ yang sebagai keputusan tertinggi ini. Akan tetapi Thailand beranggapan bahwa cara penetapan peta tersebut tidak dilakukan secara sah dan benar, serta hanya dibuat secara sepihak oleh Perancis pada saat itu. (2) Kedua, selain itu juga menurut Thailand penggunaan garis daerah aliran sungai (*watershed line*) yang digunakan salah, jika watershed line tersebut benar maka Candi Preah Vihear dan wilayah sekitarnya termasuk kedalam wilayah Thailand. Thailand meminta ICJ meninjau kembali keputusannya dan harus menggunakan peta berdasarkan *watershed line* yang benar menurut Thailand. (3) Ketiga, ketidakmauan ICJ meninjau ulang keputusan tersebut membuat permasalahan ini menjadi isu yang hangat untuk diperdebatkan oleh Thailand dan Kamboja secara terbuka. Alasan ICJ tidak ingin meninjau kembali keputusannya karena mereka tidak punya hak untuk mengubah perjanjian dan peta yang sudah dibuat oleh Perancis dan Siam tersebut, dan Peta tersebut sudah dianggap sah oleh ICJ untuk dijadikan dasar dalam menetapkan kepemilikan Candi dan wilayah sekitarnya atas nama Kamboja tersebut. Jadi ketiga penyebab ini merupakan suatu fase laten dari konflik perbatasan Thailand-Kamboja ini, karena merupakan permasalahan yang sudah lama adanya perbedaan diantara Thailand-Kamboja.

Masalah perbatasan kedua negara ini sudah menjadi isu yang terbuka untuk diperdebatkan, mulai muncul kembali karena adanya faktor pemicu yaitu sejak penetapan Candi Preah Vihear sebagai situs warisan budaya dunia (*world heritage site*) atas nama Kamboja oleh UNESCO. Hal ini menyebabkan rasa marah Thailand dan mengugat Kamboja atas penetapan *world heritage site* ini karena dianggap sebagai tindakan sepihak Kamboja bersama pemerintahan PM Thailand pada saat itu yaitu PM Samak Sundaravej melalui Menteri Luar Negerinya Nappadon Pattama yang menyetujui usulan Kamboja kepada UNESCO untuk menetapkan status candi sebagai *world heritage site*. Thailand yang tidak terima akan hal ini mencabut kembali persetujuan yang telah diberikan PM Samak bersama Nappadon Pattama kepada Kamboja karena dinilai melanggar konstitusi Thailand. Hal inilah juga yang menyebabkan jatuhnya PM Samak karena dinilai menjual kedaulatan negara. Ada beberapa

faktor yang berhasil dihimpun yang menjelaskan penyebab memanasnya hubungan kedua negara yaitu:

- 1) Perbedaan kepentingan kedua negara, mengenai penetapan garis batas yang benar menurut garis aliran sungai (*watershed line*)
- 2) Faktor kedaulatan negara, mengenai status wilayah sengketa yang masing-masing mengklaim sebagai wilayah kedaulatannya, karena garis batas kedua negara diwilayah sengketa yang belum juga diselesaikan
- 3) Politik dalam negeri, karena adanya tekanan dari dalam negeri Thailand yaitu dua kelompok kaus kuning dan kaus merah yang masing-masing mempengaruhi kebijakan pemerintah Thailand.
- 4) Mencari simpati Internasional, Thailand yang menilai Kamboja mencari simpati Internasional karena membawa kasus kepada Dewan Keamanan PBB
- 5) Kekuatan nasional, karena Thailand yang lebih mendominasi secara kekuatan nasional dari pada Kamboja, sehingga Thailand memiliki rasa percaya diri untuk melakukan agresi kepada Kamboja.

Inilah yang menyebabkan hubungan kedua negara makin tidak harmonis. Konflik senjata terjadi diantara keduanya dimulai dengan penempatan masing-masing pangkalan militer mereka diwilayah sengketa didekat Candi Preah Vihear tersebut pasca demonstrasi besar-besaran dari rakyat Thailand diwilayah perbatasan. Kontak senjata yang tidak bisa dihindarkan antara kedua negara yang mengakibatkan korban jiwa baik dari kalangan militer maupun rakyat sipil kedua negara. Hal ini membuat PM Kamboja, Hun Sen berinisiatif untuk menyelesaikan secara bilateral dengan mengedepankan cara-cara damai. Perundingan secara bilateral dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan konflik dengan mengaktifkan kembali proses demarkasi berdasarkan MoU tentang Survey dan Demarkasi batas tahun 2000. Akan tetapi, di tengah –tengah perundingan bilateral yang dilakukan kedua belah pihak, konflik pun masih sering terjadi yang menyebabkan pasang-surut hubungan dan proses perundingan bilateral tersebut. Ada beberapa alasan yang menyebabkan konflik yang masih sering terjadi seiring perundingan yang juga sedang dilakukan yaitu (1) Sikap dan reaksi Thailand dan Kamboja yang cenderung buruk dan agresif selama perundingan bilateral dilakukan, (2) rasa marah dengan saling tuduh diantara militer kedua negara terhadap faktor pemicu konflik. Kondisi seperti ini terus terjadi bahkan saat pertemuan JBC sudah dilakukan sebanyak tiga kali ditambah pertemuan-pertemuan lainnya yang bersifat informal, tetapi dari militer kedua negara masih sering terjadi kontak senjata dan belum juga dapat menemukan solusi konflik.

Kegagalan dari proses perundingan bilateral dalam menyelesaikan konflik ini membuat proses penyelesaian beralih cara lain yaitu meminta bantuan pihak lain dalam menyelesaikan konflik perbatasan dengan Thailand tersebut yang diawali dengan meminta bantuan kepada Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB memutuskan agar kedua belah pihak menghentikan kontak senjata dan kekerasan antar militer mereka, serta segera mungkin diselesaikan menggunakan cara-cara damai. Dewan Keamanan PBB juga memerintahkan ASEAN untuk membantu menengahi Thailand-Kamboja. Dari sinilah awal keterlibatan Indonesia untuk menjadi penengah konflik Thailand-Kamboja. Posisi Indonesia yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua ASEAN menjadikan isu ini menjadi salah satu dari prioritas Indonesia untuk diselesaikan dalam rangka mencapai target politik luar negeri dan Komunitas ASEAN 2015 yang salah satu agendanya adalah menjaga keamanan, perdamaian dan stabilitas kawasan. Peran Indonesia sebagai penengah konflik Thailand-Kamboja ini diselenggarakan dengan memfasilitasi berbagai pertemuan formal dan informal kedua negara secara ASEAN maupun bilateral dan juga trilateral yaitu (1) pertemuan informal kedua negara di Jakarta (2) pertemuan dalam kerangka *Joint Border Committee* (JBC) di Bogor (3) pertemuan Trilateral disela-sela KTT ASEAN ke-18 di Jakarta (4) dan pertemuan formal

Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). Semua pertemuan ini merupakan forum-forum yang bersifat informal maupun formal ini terdapat dalam mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN berdasarkan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) dan Piagam ASEAN.

Pada kesempatan pertama, saat pertemuan informal Menlu ASEAN di Jakarta, Indonesia telah menawarkan sebuah solusi yaitu penempatan sebuah tim observer Indonesia di wilayah sengketa yang berperan memastikan kondisi yang kondusif di wilayah sengketa untuk memperlancar proses negosiasi kedua negara. Kedua belah pihak pun menyetujui tawaran solusi dari Indonesia terutama Kamboja yang telah menyetujui *term of reference* (TOR) tim observer Indonesia, namun pihak Thailand masih membutuhkan verifikasi dan jawaban dari parlemen dan kabinetnya mengenai teknis penerapan tim observer Indonesia tersebut. Untuk proses mediasi kembali diadakan melalui pertemuan JBC melanjutkan proses negosiasi dan membahas perencanaan penempatan tim observer Indonesia. Pertemuan ini tidak dihadiri oleh PM Thailand, Abhisit, tapi hanya diwakili oleh penasihat Kementerian Luar Negeri Thailand. Berdasarkan PM Abhisit menolak keterlibatan tim observer Indonesia. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, saat pertemuan ini Thailand menunjukkan keberatannya menerima tim observer Indonesia karena adanya dua pandangan yang berbeda antara Kementerian Luar Negeri yang menyetujui rencana pengiriman tim observer tersebut dengan Kementerian Pertahanan yang menolak tim observer ini. Adanya pengaruh militer di Thailand yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Thailand, karena pemerintahan Thailand pada saat itu berada dibawah kendali militer melalui Perdana Menteri Abhisit yang didukung oleh militer Thailand dan juga kaus kuning/*People Alliance for Democracy* (PAD).

Berbagai alasan keberatan dan tuntutan Thailand mengenai penempatan tim observer Indonesia ini yang ditujukan kepada Kamboja dan Indonesia menjadi penghambat dalam menyelesaikan konflik ini yaitu (1) mengenai penempatan tim observer Indonesia harus berada diluar wilayah sengketa (2) kamboja harus terlebih dahulu menarik militer mereka di wilayah sengketa. Pihak Kamboja sendiri juga menolak hal demikian karena mereka berhak menduduki wilayah itu dan merasa itu wilayah kedaulatan mereka yang sah. Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa akan hal ini karena kedua belah pihak yang masih bertentangan. Untuk itu Indonesia pada satu kesempatan pertemuan trilateral kembali menegaskan dan menawarkan solusi kepada kedua belah pihak yaitu solusi satu paket dalam pertemuan Trilateral disela-sela KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, yang berisi : (1) *Joint Border Committee* (JBC), (2) Proses demarkasi batas, (3) Gencatan senjata dan (4) pengiriman tim observer Indonesia. Semua solusi ini dijadikan satu dan dilaksanakan secara bersama-sama dalam rangka mempercepat proses penyelesaian konflik agar tidak memakan waktu yang lama. Diharapkan Indonesia dengan solusi seperti ini nantinya akan membuka jalan bagi tim observer Indonesia ke wilayah perbatasan tersebut.

Disamping itu Kamboja yang melihat perbedaannya dengan Thailand ini, dan juga terdapat dua pandangan berbeda dalam negeri Thailand meminta ICJ untuk kembali menginterpretasi ulang keputusan ICJ pada 1962 dan mengambil langkah sementara (*provisional measures*) terkait Candi Preah Vihear dan wilayah sengketa tersebut. Akhirnya ICJ mengeluarkan keputusan terbarunya pada 18 Juli yang berisi:

- 1) Perintah penarikan pasukan militer kedua negara dari wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah demiliterisasi yaitu seluas 17,3 km².
- 2) Kedua belah pihak harus memberikan akses kepada tim peninjau ASEAN dalam hal ini tim observer Indonesia ke wilayah demiliterisasi.
- 3) Kedua belah pihak harus menahan diri dari kontak fisik dan senjata yang dapat memperparah keadaan.

Keputusan ICJ ini mencerminkan bahwa ICJ sangat mendukung pengiriman tim observer Indonesia dalam membantu proses perdamaian kedua belah pihak. Indonesia dituntut mengubah *term of reference* (TOR) tim observer sesuai dengan keputusan ICJ yaitu untuk ditempatkan ke wilayah seluas 17,3 km². Kondisi hubungan kedua negara sudah agak kondusif karena Thailand yang sedang fokus pada pemilihan umum di dalam negerinya, yang membuat proses mediasi sempat terhenti. Saat setelah pergantian rezim yang baru yang dipimpin oleh PM Yingluck Shinawatra, proses mediasi mulai direncanakan untuk dihentikan. Perdana Menteri Yingluck melalui pernyataannya bahwa “konflik diutamakan akan diselesaikan oleh Thailand-Kamboja”, akan tetapi tetap menjadikan Indonesia dalam bagian proses itu melalui penempatan tim observernya. Pada KTT ASEAN ke-19 di Bali, dinyatakan oleh PM Hun Sen bahwa proses mediasi benar-benar dihentikan, dan proses penyelesaian tidak akan lagi di bahas kedalam berbagai pertemuan ASEAN yang diprakarsai Indonesia, tapi tetap akan melibatkan tim observer Indonesia.

Setelah proses mediasi dihentikan, Thailand-Kamboja kembali melakukan dialog bilateral dan forum-forum bilateral mereka. Pertemuan bilateral *Regional Border Committee* pada Agustus 2011 dan *General Boundaris Commission* (GBC) pada 21 Desember 2011. Kedua belah pihak sudah bersepakat menarik pasukan mereka dari wilayah sengketa tersebut, yang pada akhirnya benar-benar dilakukan secara bertahap yaitu pada Januari 2012 dan Juli 2012. Penarikan pasukan belum sepenuhnya karena masih digantikan oleh polisi pasukan dan penjaga keamanan. Penarikan pasukan ini untuk memastikan wilayah demiliterisasi yang akan ditempati oleh tim observer Indonesia. Kedua belah pihak juga masih membentuk tim atau kelompok kerjasama yang nantinya akan bersama-sama tim observer Indonesia untuk menempati wilayah demiliterisasi tersebut dalam rangka memantau proses perdamaian melalui gencatan senjata dan penarikan pasukan militer secara keseluruhan, serta memastikan kondisi benar-benar sudah aman dan damai yang akan mendukung kedua belah pihak dalam mencapai sebuah kesepakatan / perjanjian yang mengikat berupa solusi akhir. Walaupun semua sudah dipersiapkan masih harus menunggu persetujuan dari parlemen dan kabinet Thailand melalui prosedur-prosedur internal Thailand. Hingga sampai saat ini belum juga ada kepastian ataupun keputusan dari kedua belah pihak mengenai penempatan tim observer Indonesia bersama dengan kelompok kerjasama Thailand-Kamboja yang akan bertugas di wilayah demiliterisasi. Sampai saat posisi keketuan ASEAN pada tahun 2012 yang dijabat oleh Kamboja, keduanya masih belum melakukan tindak lanjut mengenai penempatan tim observer Indonesia ini. Kamboja yang menjabat sebagai ketua ASEAN membuat Kamboja harus fokus pada kepemimpinannya dan seolah-olah proses penyelesaian dikesampingkan.

Jadi, dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa perbatasan Thailand-Kamboja ini hanya sampai pada solusi sementara, karena solusi akhir yang diharapkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang mengikat belum tercapai. Akan tetapi semua proses penyelesaian dan juga mediasi oleh Indonesia tidaklah gagal, memang dari semua proses penyelesaian belum dapat mencapai sebuah kesepakatan perdamaian yang mengikat kedua belah pihak, tetapi secara kasat mata hubungan kedua belah pihak sudah membaik dan kondisi di wilayah sengketa pun sudah makin kondusif, tidak ada penambahan pasukan ataupun baku tembak lagi di wilayah sengketa tersebut. Indonesia berhasil menciptakan suasana kondusif dimana kedua belah pihak bisa melakukan proses penyelesaian secara damai.

Penutup

Perdamaian kedua belah pihak hanya bisa dicapai dengan keseriusan dan kesungguhan Thailand-Kamboja untuk berkoordinasi dan bekerjasama saling mendukung satu sama lain. Dengan adanya sikap seperti itu akan dapat mendorong mencapai perdamaian yang lebih cepat agar jangan lagi ditunda atau diulur waktunya, karena sewaktu-waktu bisa saja kembali

menjadi konflik terbuka. Solusi yang ditawarkan Indonesia yang sudah disepakati kedua belah pihak diharapkan mampu mendukung dan mendorong kedua belah pihak agar menjalankan proses perdamaianya dengan baik. Tinggal menunggu saja waktunya kapan permintaan untuk pengiriman tim observer Indonesia sebagai solusi untuk membantu kedua belah pihak dalam mencapai perdamaianya.

Konflik semacam ini sangat sensitif karena menyangkut kedaulatan negara. Untuk itu koordinasi dan kerjasama yang baik dari internal negara kepada maupun keluar yaitu kepada negara lawannya akan mampu menciptakan suasana yang baik dalam proses penyelesaian. Selain itu kepercayaan negara anggota terhadap ASEAN haruslah ditumbuhkan, karena ASEAN sendiri memiliki mekanisme dan *high council* dalam membantu menyelesaikan sengketa antar anggotanya, agar konflik semacam ini tidak menjadi isu internasional yang akan memperburuk citra ASEAN sebagai organisasi regional dimata Internasional jika tidak berhasil diselesaikan sendiri. Langkah lainnya yang bisa diambil dalam menciptakan suasana seperti ini adalah dengan memperbaiki landasan hukum dalam mekanisme penyelesaian sengketa, harusnya ada sanksi/hukuman bagi yang melanggar, agar pihak yang terlibat konflik memiliki rasa takut, tunduk, dan patuh terhadap hukum penyelesaian sengketa ASEAN.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Bachtiar. . *Perdamaian Thailand-Kamboja Terganjil Parlemen*.
<http://m.inilah.com/read/detail/1811122/perdamaian-thailand-kamboja-terganjal-parlemen>.
Diakses 3 Desember 2012
- Armandhanu, Denny. 2011. *Menlu RI Dorong Peran Mediasi Damai di PBB*.
<http://wap.vivanews.com/news/read/248786-menlu-ri-dorong-peran-mediiasi-damai-di-pbb>.
Diakses 5 Oktober 2011.
- Akbar, Aulia. 2011. *Menteri Pertahanan Kamboja ajak Menteri Pertahanan Thailand berunding*.
<http://international.okezone.com/read/2011/08/15/411/492198/menhan-kamboja-ajak-menhan-thailand-berunding>. Diakses 20 Maret 2012.
- Akbar, Aulia . *Era Baru Hubungan Thailand & Kamboja*.<http://international.okezone.com/read/2011/08/13/411/491577/era-baru-hubungan-thailand-kamboja>. Diakses 25 Desember 2012
- Bora Touch, Esq. (Australia, 29 June 2008). *Preah Vihear Temple and the Thai's Misunderstanding of the World Court Judgment of 15 June 1962*. <http://www.preah-vihear.com/>. Diakses 5 Desember 2012
- Cambodia and Thailand Agreed to Accelerate Border Negotiation*.
<http://www.mfaic.gov.kh/mofa/Products/734-cambodia-and-thailand-agreed-to-accelerate-border-negotiation.aspx>. Diakses 15 Desember 2012
- Focus Group Discussion : *menyongsong keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2011*. Jakarta : 20 Agustus 2010. <http://www.csis.or.id/SeminarEventDetail.php?id=383>. Diakses 23 September 2012
- Hilton Tarnama P & Eka An Aqimuddin, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN*. 2011
- Huala Adolf. 2008. *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Jakarta : sinar grafika.

- ICJ. *ICJ Judgement on Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Merits)*. 15 June 1962.
<http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=284&code=ct&p1=3&p2=3&case=45&k=46&p3=5>. Diakses 5 Desember 2012
- Indonesia Fasilitasi Thailand-Kamboja*. 2011.
<http://internasional.kompas.com/read/2011/04/08/12564364/Indonesia.Fasilitasi.Thailand-Kamboja>. Diakses 13 Desember 2012
- Irewati, Awani, dkk. Draft penelitian DIPA 2011. *Sengketa wilayah perbatasan Thailand-Kamboja*. Jakarta : P2P-LIPI
- Luhulima, CPF. 2011. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Lexi, J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007,
- Londo, Paulus, *Sengketa Perbatasan Antar Negara di Kawasan Asia-Pacific*.<http://www.tnial.mil.id/TroopInfo/PeneranganPasukan/tabid/104/articleType/ArticleView/articleId/42/Default.aspx>. Diakses 2 Desember 2012
- Menanti Diplomasi Tingkat Tinggi Indonesia dalam Konflik Thailand-Kamboja*. 2011.
<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik-internasional/451-menanti-diplomasi-tingkat-tinggi-indonesia-dalam-konflik-thailand-kamboja>. Diakses 2 Desember 2012
- Progress on the work of Thai-Cambodian Joint Boundary*.<http://www.mfa.go.th/main/en/media-center/28/2917-Progress-on-the-work-of-Thai-Cambodian-Joint-Bound.html>. Diakses 14 Desember 2012
- The Temple of Preah Vihear : Proposed for the Inscription the World Heritage List (UNESCO)*. By The Council Of Ministers Kingdom of Cambodia 2008
- U.N. Security Council calls for ceasefire between Thailand, Cambodia*.
<http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/02/14/un.cambodia.thailand/index.html> . Diakses 18 Desember 2012